

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan salah satu organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerah masing-masing secara mandiri. Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya saat ini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas pada pelaporan keuangan atas organisasi-organisasi publik, baik di pusat maupun di daerah. Korupsi, kolusi, serta nepotisme adalah fenomena yang menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap keuangan Negara, sehingga tuntutan untuk transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan Negara meningkat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap tuntutan publik atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu keuangan daerah haruslah dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomi, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan diantaranya yaitu pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang baik dan berkualitas secara akuntabel adalah yang menyajikan informasi yang benar, jujur, dapat diandalkan, dan dapat dipahami. Terdapat kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah relevan, andal, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Setiap tahunnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk mengeluarkan opini atas audit tersebut. Penilaian atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh BPK RI dinyatakan dalam empat opini yakni, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Asahan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang pada hasil pemeriksaan BPK tahun 2017-2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017-2018. (BPKRI.com, Februari 2020). Mendapatkan opini WTP adalah suatu prestasi yang dibanggakan, namun perlu dipahami bahwa meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan/kecurangan.

Menteri keuangan menyatakan:

“mestinya jika sudah WTP, makin sulit terjadi penyimpangan karena sudah terbangun sistem pengendalian internal yang baik. Tetapi faktanya, opini WTP ternyata tidak menjamin bebas dari korupsi bahkan saat ini banyak kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dibeberapa lembaga yang memperoleh WTP, pejabatnya malah tersangkut korupsi. Misalnya, Kementerian Agama mendapat WTP, ditemukan korupsi, bahkan Menteri Agama juga terjerat korupsi. Di Sumatera Utara, mendapat WTP tapi Gubernur terlibat korupsi. Hal sama terjadi di beberapa lembaga pemerintah (DetikNews.com, Juny 2019).”

Terdapat fenomena yang ditemukan di pemerintah Kabupaten Asahan yaitu diduga korupsi, berdasarkan temuan BPK-RI atas LK Pemkab Asahan tahun 2018 pada Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dijelaskan dari hasil pemeriksaan fisik atas kendaraan pada Setda Kabupaten Asahan yaitu terdapat satu unit sepeda motor Merk Kawasaki tidak dapat dihadirkan dan pengguna kendaraan tidak diketahui keberadaannya (Asahansatu.com, Agustus 2019). Selain itu terjadi korupsi para pejabat dan rekanan Asahan sebesar Rp 5.2 miliar (Kisaran, Gatra.com, Desember 2018).

Fenomena lain yang terjadi berdasarkan LKPD 2017 yang telah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yakni penatausahaan barang persediaan pada 27 OPD, pengelolaan aset tetap, serta pengelolaan retribusi daerah pada sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak tertib, keterlambatan penyetoran pajak dan pertanggungjawaban belanja tambahan uang (TU) dilakukan

tidak tepat waktu, pendapatan dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak dianggarkan, Kabupaten Asahan belum mengelola pinjaman daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, kemudian dalam pencapaian target pelaksanaan APBD TA 2017 bahwa terbatasnya kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah, terdapat selisih atas sisa tunggakan dana bergulir yang tidak dapat dijelaskan, banyaknya dana, belanja hibah, serta bantuan sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Fenomena ini mengindikasikan fungsi akuntansi sebagai alat perencanaan, pengendalian dan dasar pengambilan keputusan belum difungsikan secara maksimal sehingga masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dipengaruhi dengan belum maksimalnya dalam penggunaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, ketersediaan sumber daya manusia, termasuk sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta komitmen organisasi, mengakibatkan dalam tataran pelaksanaannya selalu mengalami kendala. Sehingga penelitian lebih lanjut terkait kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Asahan ini kiranya perlu dilakukan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan meningkatkan kompetensi dan pengetahuan operator keuangan dalam penyusunan laporan keuangan. Sebaliknya atasan langsung sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap laporan keuangan perlu diberikan pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Terkait dengan permasalahan inventarisasi dan pengelolaan aset instansi pemerintah, maka perlu

memperkuat kembali Sistem Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Aset Tetap. Serta diperlukan Komitmen dari pimpinan, suport yang kuat dari seorang pimpinan yang merupakan salah satu kunci keberhasilan dari suatu perubahan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Terbitnya aturan tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP sebagai amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengisyaratkan kebijakan reformasi keuangan negara/daerah dalam rangka mewujudkan good governance pada pemerintah pusat maupun daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Darma, 2019). Inapty dan Martiningsih (2016) mengatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang berkualitas berhubungan dengan keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sistem akuntansi yang dikembangkan dengan mengacu pada SAP (Hadi dan Darwanis, 2017). Dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian,

pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Hakim (2017) menyatakan bahwa dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik maka akan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Menurut Adiyanto (2018) bahwa untuk mengelola keuangan daerah yang baik dan berkualitas, pemerintah kabupaten / kota harus memiliki sumber daya manusia yang baik dan kompeten, yang dilengkapi dengan tingkat pendidikan berbasis akuntansi. Karyawan yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam pekerjaan akan menghadapi banyak kendala yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan energi. Kompetensi dapat dikembangkan melalui pengetahuan / pendidikan, pengalaman dan pelatihan (Haliah dan Nirwana, 2019).

Wujud dalam terciptanya kualitas laporan keuangan dibutuhkan penerapan sistem pengendalian intern. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu sistem pengendalian intern merupakan hal yang sangat penting diperhatikan untuk menghindari kerugian disuatu kegiatan organisasi. Lawrence dalam (Lagat, dkk 2016) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah jantung dari setiap organisasi dan berpendapat bahwa kapasitas pengendalian internal yang solid membantu organisasi untuk bekerja dengan tegas dan menguntungkan.

Pencapaian tujuan pengendalian internal adalah meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektif dan efisien (Wahyudi, 2017).

Nor dkk, (2019) menyatakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personil yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan akuntabilitas dari pemerintah daerah. Komitmen memiliki arti bahwa lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan aktif dan keinginan untuk memberikan kontribusi yang berarti/bermanfaat pada organisasinya. Selain itu komitmen kepala pemerintah daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan juga sangat penting. Menurut Bouhawia (2015) bahwa Komitmen organisasi adalah hubungan antara karyawan dan organisasi dengan menunjukkan keinginan kuat untuk mempertahankan keanggotaannya, serta menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi dan bersedia berusaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bersedia untuk berjuang untuk pencapaian tujuan dan kesinambungan dari organisasi.

Peneliti melakukan penelusuran riset-riset yang terkait dengan kualitas laporan keuangan oleh para peneliti terdahulu dan menyajikan hasil penelitian bervariasi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dkk (2018) dengan judul “pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan” menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Karena untuk lebih meningkatkan keterbandingan laporan keuangan Pejabat Penatausahaan Keuangan perlu menerapkan sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar akuntansi pemerintah. Hasil penelitian Sihite dan Holawati (2017), penelitian Nurpaida dkk (2017), penelitian Ramadhan dan Alpi (2019) memberikan bukti penelitian bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Elfauzi dan Sudarno (2018) menyatakan bahwa variabel SAP memiliki koefisien sebesar 0,026 dan *t-value* sebesar 0,241 dengan tingkat signifikansi 0,810. Hasil tersebut menunjukkan bahwa SAP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga SAP tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Alasannya penerapan standar akuntansi pemerintah di lingkup kabupaten demak belum begitu memadai, perlu adanya peningkatan penerapan standar akuntansi guna mengurangi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

Penelitian Andelina dan Haryanto (2017) dengan judul “pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah” menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan artinya keuangan daerah diterapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing SKPD Kabupaten Demak berkualitas. Dikatakan bahwa

Dengan diterapkannya system akuntansi keuangan daerah ini, maka dapat mempermudah kinerja pegawai Kabupaten Demak dalam menyusun laporan keuangan, mempercepat proses transaksi dan penyajian laporan. Sama dengan penelitian Nahar (2017) bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Iskandar (2017) memberikan hasil atas penelitiannya bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memediasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penggunaan teknologi informasi yang tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu. Studi ini merekomendasikan bahwa harus ada program pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kepala manajemen harus mendukung penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal agar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih optimal. Penelitian Suhardjo (2019) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut dilakukan di 7 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Analisis data menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hadi dan Darwanis (2017) variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh sangat kuat terhadap proses penyusunan laporan keuangan SKPD. Begitu juga dengan penelitian Haliah dan Nirwana (2017) "The development of good governance model for performance

improvement” bahwa kompetensi sangat kuat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. yang artinya apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sehingga pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan menjadi semakin baik pula. Sedangkan penelitian Andelina dan Haryanto (2017) kompetensi sumber daya manusia negatife/tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang artinya semakin kompeten sumber daya manusia maka belum tentu laporan keuangan daerah menjadi berkualitas.

Berdasarkan penelitian Hakim (2017), penelitian Setyaaningrum dan Atiningsih (2018), dan penelitian Rahmawati dkk (2018) dengan variabel sistem Pengendalian Intern Pemerintah memberikan bukti empiris bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dijalankan oleh SKPD, akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hakim (2017) menyatakan bahwa didalam konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara tentang Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian Pratama dan Yahya (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. Lembaga pemerintah yang memiliki komitmen dalam penyajian laporan keuangannya akan selalu berupaya untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta memiliki informasi yang berkualitas. Sama dengan hasil penelitian Zodia (2015) bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki staf keuangan/akuntansi maka semakin tinggi pula keterandalan laporan keuangan yang dihasilkan.

Sedangkan penelitian Yeni dkk (2016) komitmen pimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam siaran pers BPK, opini yang diterbitkan BPK atas laporan keuangan, tergantung dari komitmen dan disiplin pimpinan dan seluruh pegawai kementerian/lembaga dalam menjalankan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan pada perundangan, serta penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian/ lembaga sangat tergantung dari komitmen pimpinan dan partisipasi aktif pelaksana untuk terus membenahi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Begitu juga dengan penelitian Nor dkk (2019) bahwa komitmen kepala

pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah ' situs web di seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menyajikan hasil yang beragam terkait kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut maka penulis ingin mengetahui apakah hal tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan atau tidak. Kemudian dengan melihat banyaknya permasalahan yang muncul terkait laporan keuangan pemerintah Kabupaten Asahan berdampak besar pada kualitas akuntabilitas pengelolaan Pemda, serta melihat kondisi saat ini yang mewajibkan seluruh organisasi publik untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan, membuat peneliti tertarik untuk melihat apakah ada pengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumberdaya manusia, sistem pengendalian intern, dan komitmen organisasi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hadi dan Darwanis (2017) dengan persamaan variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan komitmen organisasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain: pertama, peneliti menambahkan variabel peneran standar akuntansi pemerintah. Kedua, peneliti menambah variabel independen yaitu variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah karena penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu faktor keberhasilan atas suatu laporan keuangan yang berkualitas. Jika suatu daerah sudah melaksanakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas. Selanjutnya alasan untuk menambah variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah karena berdasarkan rekomendasi dari penelitian Hadi dan Darwanis (2017) bahwa peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan oleh aparatur seperti penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Kedua, yaitu objek penelitian, dimana objek penelitian ini adalah OPD Kabupaten Asahan yang mana penelitian sebelumnya yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Utara.

Perbedaan ketiga yaitu pada indikator Komitmen Organisasi penelitian sebelumnya menggunakan indikator (1) memiliki kepercayaan yang kuat dan menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi, (2) kemauan yang kuat untuk berusaha atau bekerja keras untuk organisasi, (3) keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Penelitian saya menggunakan indikator dari penelitian Allen & Meyer (1990) yaitu komitmen fektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif.

Perbedaan terakhir yaitu populasi pada penelitian ini dengan sebelumnya menjadikan sangat bernilai untuk menentukan derajat tingkat temuan penelitian yang dapat digeneralisasikan.

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka peneliti tertarik ingin meneliti tentang seberapa besar **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Di OPD Kabupaten Asahan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan?
3. Bagaimana Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan?
4. Bagaimana Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan?
5. Bagaimana Komitmen Organisasi pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan?
6. Seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan?
7. Seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan?

8. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan?
9. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Intern pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan?
10. Seberapa besar pengaruh Komitmen Organisasi pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Asahan?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini akan membatasi masalah yakni hanya untuk melihat apakah Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Komitmen Organisasi memiliki pengaruh simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan ?

2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan ?
3. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan ?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan ?
5. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan ?
6. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Komitmen Organisasi memiliki pengaruh simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.

2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.
4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Untuk memperoleh bukti empiris apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.
6. Untuk memperoleh bukti empiris apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Asahan, sehingga penulis mengetahui bahwa kualitas kualitas laporan keuangan di suatu daerah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.

2. Bagi Praktisi

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak OPD dalam mengembangkan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan komitmen organisasi, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan di Indonesia pada khususnya.